



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Makassar, 26 November 2018

Kepada

Nomor : 800 / 6359 / BKD
Lampiran : 2 (dua) exp
Perihal : **Penyampaian Pelaksanaan
Seleksi Terbuka IPT Madya**

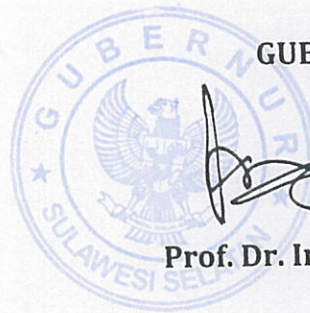
Yth. (daftar terlampir)

Di - **Tempat**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka bersama ini disampaikan bahwa akan dilaksanakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Seleksi Terbuka, sehubungan hal tersebut kami memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan di Lingkungan Instansi Saudara untuk mendaftarkan diri dan mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan dimaksud.

Adapun ketentuan dan persyaratan pendaftaran dapat dilihat dalam lampiran Surat ini atau diunduh melalui website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan <http://bkd.sulselprov.go.id>.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang terjalin diucapkan terima kasih.



GUBERNUR SULAWESI SELATAN


Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
3. Peringgal.

DAFTAR UNDANGAN

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi;
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga;
25. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM;
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata;
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Sekretariat Negara;
30. Sekretaris Jenderal Kementerian PPN/Sekretaris Utama BAPPENAS;
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
32. Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN;
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
34. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
35. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung;
36. Sekretaris Utama Badan Intelejen Negara (BIN);
37. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
38. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN);
39. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
40. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
41. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
42. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);
43. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
44. Sekretaris Jenderal DPR;
45. Sekretaris Jenderal MPR;
46. Sekretaris Jenderal DPD;
47. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet;

48. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN);
49. Sekretaris Utama Arsip Nasional (ANRI);
50. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN);
51. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS);
52. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS);
53. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
54. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG);
55. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
56. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
57. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
58. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP);
59. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
60. Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional (BSN);
61. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
62. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS);
63. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (BAKAMLA);
64. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
65. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
66. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
67. Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF);
68. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- ✓ 69. Sekretaris Mahkamah Agung;
70. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
71. Sekretaris Jenderal Ombudsman;
72. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
73. Sekretaris Jenderal Yudisial;
74. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
75. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);
76. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
77. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
78. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
79. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
80. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
81. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
82. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
83. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
84. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
85. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung;
86. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
87. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
88. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
89. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
90. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
91. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
92. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
93. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
94. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
95. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
96. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

97. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
98. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
99. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
100. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
101. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
102. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
103. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
104. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
105. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
106. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
107. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
108. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
109. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
110. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
111. Sekretaris Daerah Kab. Bantaeng;
112. Sekretaris Daerah Kab. Barru;
113. Sekretaris Daerah Kab. Bone;
114. Sekretaris Daerah Kab. Bulukumba;
115. Sekretaris Daerah Kab. Enrekang;
116. Sekretaris Daerah Kab. Gowa;
117. Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto;
118. Sekretaris Daerah Kab. Luwu;
119. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
120. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara;
121. Sekretaris Daerah Kab. Maros;
122. Sekretaris Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan;
123. Sekretaris Daerah Kab. Pinrang;
124. Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
125. Sekretaris Daerah Kab. Sidenreng Rappang;
126. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai;
127. Sekretaris Daerah Kab. Soppeng;
128. Sekretaris Daerah Kab. Takalar;
129. Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja;
130. Sekretaris Daerah Kab. Toraja Utara;
131. Sekretaris Daerah Kab. Wajo;
132. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
133. Sekretaris Daerah Kota Palopo;
134. Sekretaris Daerah Kab. Parepare;
135. Para Staf Ahli, Asisten, Kepala Biro dan Kepala OPD Lingkup Prov. Sulsel.